

ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Obyek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul penelitian "Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2010-2011". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang analisis rasio dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten Yogyakarta adalah dengan rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pengelolaan belanja, dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio keuangan dari tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa (1) rasio kemandirian rata-rata mengalami peningkatan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dalam kriteria sangat baik dan menggambarkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah (2) rasio efektifitas mengalami peningkatan menunjukkan tingkat efektivitas keuangan daerah dalam kriteria cukup efektif (3) rasio efisiensi yang mengalami penurunan tidak merubah tingkat efisiensi keuangan daerah tetap dalam kriteria tidak efisiensi (4) rasio belanja rutin terhadap APBD secara keseluruhan telah mengalami peningkatan, demikian juga dengan hasil perhitungan rasio belanja pembangunan terhadap APBD (5) rasio pengelolaan belanja rata-rata mengalami penurunan menunjukkan pemerintah daerah mengalami defisit anggaran (6) rasio pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan mengalami penurunan pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya belum tercapai Sedangkan untuk hasil analisis secara umum menunjukkan bahwa pemerintah DIY masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY untuk lebih meningkatkan PAD dengan meningkatkan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat.